



**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDAPATAN PER KAPITA DAN AKSES
SANITASI LAYAK TERHADAP KEMISKINAN**

Andika Fitriana¹⁾, Evi Gravitiani²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author: andikafitriana8@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan memiliki sifat multidimensional. Dampak dari kemiskinan berpengaruh ke dalam aspek kehidupan manusia dan membentuk suatu perangkap lingkaran yang saling berkaitan satu sama lain sehingga keberadaannya harus diputus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, dan akses sanitasi layak terhadap kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb. Belanja modal sebagai proksi dari desentralisasi fiskal. Deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Data berasal dari data sekunder yang diambil dari DJPK Kemenkeu dan Badan Pusat Statistik dengan data *time series* yaitu tahun 2013-2020 dan *cross section* pada lima kabupaten. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. IPM dan pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb, sedangkan akses sanitasi layak berpengaruh negatif, namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: a) Diperlukan implementasi program dari alokasi belanja modal yang dapat menyentuh dasar masalah masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur diharapkan berjalan secara efektif, b) Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pembangunan manusia terutama sektor pendidikan dan kesehatan, c) Pemerintah perlu membekali masyarakat dengan *skill* baru yang diperlukan saat ini dalam dunia kerja, d) Meningkatkan anggaran perbaikan untuk akses sanitasi layak karena sanitasi layak merupakan kebutuhan yang vital..

Kata Kunci: Kemiskinan, Belanja Modal, IPM, Pendapatan Per Kapita, Akses Sanitasi Layak, Regresi Data Panel

JEL Klasifikasi: I32, H54, I15, E01, I18, C33

This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



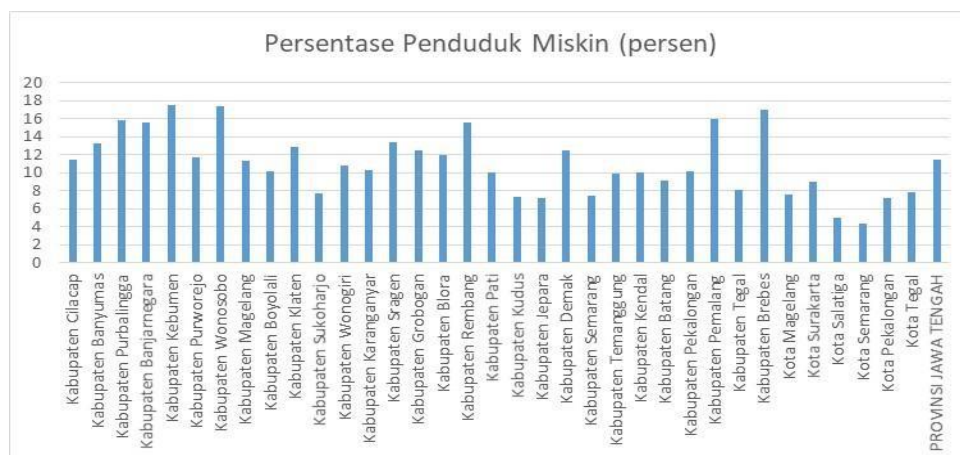
1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu langkah yang diambil oleh sebuah negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Pada awal dasawarsa 1950-an sampai 1960-an, negara-negara berkembang mulai mencapai target pertumbuhan ekonomi yang mereka targetkan namun hal tersebut tidak memiliki pengaruh pada kehidupan masyarakat yang cenderung tidak mengalami perbaikan pada tingkat kesejahteraannya. Dalam Todaro & Smith (2011) seorang ekonom Inggris,

Dudley Seers, menegaskan bahwa penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan yang terjadi dalam suatu negara menunjukkan tanda keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh negara tersebut. Sebaliknya, jika ketiga masalah tersebut memburuk maka tidak bisa disebut sebagai “pembangunan” meskipun pendapatan mengalami peningkatan berlipat ganda.

Berkurangnya angka kemiskinan adalah salah satu cara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dari hasil pembangunan nasional. Secara ekonomi, suatu rumah tangga dikategorikan miskin jika tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok yang menjadi standar minimum, seperti pakaian, makanan, rumah, kesehatan serta pendidikan (Suryawati, 2005). Suatu kemiskinan merupakan fenomena yang berkelanjutan dan seringkali dianggap sebagai fenomena turunan. Seseorang yang hidup dalam kemiskinan tidak hanya terbatas pada masalah pendapatan rendah, tetapi lebih luas dari itu. Dampak dari kemiskinan mempengaruhi dasar-dasar kehidupan manusia. Pada bidang kesehatan, kemiskinan meningkatkan angka stunting, kurang gizi, ketidakterjangkauan fasilitas kesehatan. Di bidang pendidikan kemiskinan menimbulkan efek yang menyebabkan terjadinya putus sekolah, hal ini akan berimbas pada rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang kemudian akan berdampak pada rendahnya pendapatan. Berbagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya kemiskinan menyebabkan kemiskinan dikatakan sebagai fenomena multidimensional karena menyangkut berbagai dimensi kehidupan dasar manusia.

Provinsi Jawa Tengah tak luput dari masalah kemiskinan, dari data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua ditempati oleh Jawa Tengah kemudian Jawa Timur menempati posisi pertama pada tahun 2020. Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 4.419,1 ribu penduduk, Jawa Tengah sebanyak 3.980,9 ribu penduduk kemudian diikuti Provinsi Jawa Barat sebanyak 3.920,23 ribu penduduk.



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin (persen) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1 menunjukkan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,41%. Kabupaten Kebumen memiliki urutan paling tinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar 17,59%, disusul Kabupaten Wonosobo sebesar 17,36%, diurutan ketiga adalah Kabupaten Brebes 17,03%. Selanjutnya, Kabupaten Pemalang 16,02%, Kabupaten Purbalingga 15,9%, Kabupaten Banjarnegara 15,64%, Kabupaten Rembang 15,6%, Kabupaten Sragen 13,38% dan Kabupaten Banyumas sebesar 13,26%. Berkurang atau bertambahnya penduduk miskin dipengaruhi berbagai faktor internal maupun eksternal.

Eks Karesidenan Banyumas meliputi lima kabupaten yang biasa disebut Barlingmascakeb memiliki persentase penduduk miskin diatas rata-rata persentase kemiskinan provinsi sedangkan jumlah penduduk miskin pada wilayah tersebut seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Barlingmascakeb tahun 2013-2020

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)								Jumlah
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Banjarnegara	166,8	159,5	165,4	158,2	156,8	141,7	136,1	144,95	1.229,45
Purbalingga	181,1	176	176,5	171,8	171,9	144,2	140,1	149,48	1.311,08
Banyumas	296,8	283,5	285,9	283,9	283,2	226,2	211,6	225,84	2.096,94
Cilacap	255,7	239,8	243,5	240,2	238,3	193,2	185,2	198,6	1.794,50
Kebumen	251,1	242,3	241,9	235,9	233,4	208,7	201,3	211,09	1.825,69

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1 menunjukkan data pada Barlingmascakeb selama delapan tahun cenderung mengarah pada *trend* penurunan. Tahun 2013 menjadi tahun dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi selama delapan tahun. Kabupaten Banyumas merupakan kabupaten yang menyumbang jumlah paling tinggi dari empat daerah lain yakni sebesar 2.096,94 ribu jiwa. Tahun 2013, Banyumas memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 296,8 ribu jiwa, tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi sebanyak 283,5 ribu jiwa kemudian meningkat kembali pada 2015, sedangkan tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah penduduk miskin terbanyak kedua adalah Kabupaten Kebumen di mana jumlah penduduk miskin pada kabupaten ini menurun dari 2013-2019 namun mengalami peningkatan menjadi sebanyak 211,09 ribu jiwa pada 2020. Posisi ketiga dan keempat diikuti oleh Cilacap dan Purbalingga dengan jumlah masing-masing sebesar 1.794,5 ribu jiwa dan 1.311,08 ribu jiwa. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin paling rendah di kawasan Barlingmascakeb terdapat pada Banjarnegara tahun 2013-2020 yakni sebesar 1.229,45 ribu jiwa.

Pemerintah daerah berupaya untuk menekan kemiskinan dengan strategi dan kebijakan yang telah dirancang dalam rangka pengentasan kemiskinan. Setiap daerah memiliki strategi dalam menanggulangi kemiskinan daerahnya karena pemerintah Indonesia telah menjalankan otonomi daerah pada tiap-tiap daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu berubahnya sistem pemerintahan yang dahulunya terpusat atau sentralistik berubah menjadi desentralisasi. Dengan demikian, salah satu kewenangan yang berkaitan dengan urusan fiskal menjadi kewenangan daerah otonom. Tahun 2001 menjadi awal mula diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia, memiliki tujuan untuk mengurangi tingkat pendapatan antardaerah dan mendorong peningkatan pada perekonomian daerah.

Desentralisasi fiskal dipandang dari dua sisi yaitu, pengeluaran dan pendapatan. Dari sisi pengeluaran yakni belanja daerah berguna memperlancar jalannya pemerintahan baik provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah memilih dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan. Komponen dari belanja daerah yang memiliki manfaat untuk memperpanjang laju perekonomian ialah belanja modal. Susilowati et al. (2017) mengartikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang dimanfaatkan guna membeli aset tetap dan aset yang lain dengan masa guna di atas satu periode. Belanja modal dipergunakan untuk aktivitas yang bersifat produktif sehingga diharapkan dapat memperlancar jalannya perekonomian. Besarnya alokasi belanja modal akan berpengaruh pada dana yang digunakan untuk pembangunan, semakin besar jumlahnya maka akan memperkecil tingkat kemiskinan.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah, kualitas SDM menjadi indikator yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Sumber daya manusia menjadi faktor yang mendukung laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Perbaikan kualitas SDM adalah salah satu cara yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut Nurkse dalam teori lingkaran kemiskinan menyebutkan bahwa SDM yang rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan seseorang menjadi rendah. Pembangunan manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah ukuran strategis yang dimanfaatkan guna melihat keseluruhan upaya dan kinerja pembangunan dalam suatu daerah (Kotambunan et al., 2016).

Kemiskinan memiliki keterkaitan hubungan dengan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi biasanya mendapatkan peluang lebih besar tercukupinya kebutuhan rumah tangga dibandingkan masyarakat dengan pendapatan rendah. Pendapatan rata-rata penduduk atau yang dikenal dengan pendapatan per kapita dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi oleh setiap negara. Selain itu, juga dapat menggambarkan jurang tingkat kemakmuran antara negara satu dengan negara lain dalam pembangunan ekonomi. Penduduk yang memiliki pendapatan per kapita tinggi mengidentifikasi kesejahteraan penduduk tersebut tinggi. Sukirno (2010) mengatakan bahwa tingginya pendapatan per kapita menyebabkan daya beli masyarakat ikut bertambah, dari bertambahnya daya beli akan meningkat pula kesejahteraan masyarakat.

Faktor penyebab kemiskinan lainnya yaitu ketersediaan sanitasi layak dimiliki oleh masyarakat. Akses sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas dasar yang perlu dipenuhi oleh manusia. Faktor pendukung masyarakat miskin untuk dapat keluar dari kemiskinan adalah akses terhadap infrastruktur (Nugraha et al., 2021). WEDC dalam Manase et al. (2009) mengatakan ketersediaan sanitasi yang memadai penting untuk upaya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan kajian yang dilakukan World Bank dalam Water Sanitation Program (WPS) kerugian ekonomi mencapai 2,3% dari PDB tahunan akibat dari layanan sanitasi yang kurang memadai di Indonesia (World Bank, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah menggambarkan analisis hubungan antarvariabel, namun masih terdapat perbedaan pada hasil penelitian sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini mengambil studi kasus wilayah penelitian Barlingmascakeb yang terdiri atas lima kabupaten yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, serta Kebumen disebabkan karena daerah tersebut memiliki tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan provinsi. Selain itu, dari penelitian-penelitian sebelumnya masih sedikit literatur yang membahas tentang kawasan tersebut secara spesifik. Tahun analisis yang digunakan dalam penelitian pada tahun 2013-2020, hal ini dilatarbelakangi karena dalam jangka waktu tersebut tingkat kemiskinan wilayah Barlingmascakeb di atas tingkat kemiskinan provinsi. Kemudian, variabel independen yang digunakan dapat dilihat dampaknya apabila di atas tiga tahun karena hasil dari pembangunan suatu wilayah lebih efektif apabila dilihat dalam jangka panjang.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik meneliti “*Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita dan Akses Sanitasi Layak Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen Tahun 2013-2020)*”.

2. METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yakni deskriptif kuantitatif. Penelitian memiliki fokus untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal yang dilihat dari belanja modal, Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita serta akses sanitasi layak terhadap kemiskinan. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu lima kabupaten di Provinsi Jawa Tengah meliputi, Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb). Periode tahun yang digunakan adalah 2013 sampai 2020 sehingga didapatkan jumlah observasi sebanyak 40 observasi. Data yang dipakai berasal dari data sekunder. Software atau alat analisis yang dipakai yaitu Eviews versi 9 dan Microsoft Excel 2010.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari dari website DJPK Kemenkeu dan Badan Pusat Statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang digunakan yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah aktivitas untuk mendapatkan informasi dari berbagai topik atau tulisan yang sudah ada seperti jurnal, artikel, buku, dan internet mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini studi kepustakaan akan

dicari melalui penelitian jurnal terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, buku dan internet yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

a. Variable Terikat

Variabel terikat yang digunakan adalah variabel kemiskinan yang diukur dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin yang memiliki rata-rata pendapatan per kapita dibawah garis kemiskinan yang didasarkan pada kriteria dari BPS yang terdapat di wilayah Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Tingkat kemiskinan sebagai variabel Y.

b. Variabel Bebas

1) Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk membeli asset tetap dan lainnya di mana memiliki nilai guna diatas satu tahun. Data belanja modal dari masing-masing kabupaten di wilayah Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Variabel belanja modal sebagai variabel X1.

2) Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah indeks yang diukur dengan tiga dimensi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Penelitian menggunakan tingkat IPM masing-masing kota/kabupaten di wilayah Barlingmascakeb tahun 2013-2020 sebagai variabel X2.

3) Pendapatan Per Kapita

Adalah pendapatan rata-rata pada suatu daerah dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Penelitian ini menggunakan data pendapatan per kapita masing-masing kota/kabupaten di wilayah Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Pendapatan per kapita sebagai variabel X3.

4) Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang telah memenuhi syarat kesehatan. Penelitian ini menggunakan persentase penduduk terhadap akses sanitasi layak di wilayah Barlingmascakeb tahun 2013-2020 sebagai variabel X4.

Teknik Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memiliki manfaat untuk mendeskripsikan data atau objek penelitian tanpa bertujuan menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.

b. Regresi Data Panel

Teknik analisis data yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dan uji asumsi klasik. Data panel adalah gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan data lintas sektoral (*cross section*).

Model Penelitian

Pemilihan model terbaik yaitu model yang dipakai untuk model estimasi regresi, di bawah ini telah diperoleh model yang akan digunakan:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 LOGBM_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 LOGPENDAPATAN_{it} + \beta_4 LOGSAN_{it} + e_{it}$$

Di mana:

TK	= tingkat kemiskinan
LOGBM	= logaritma belanja modal
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
LOGPENDAPATAN	= logaritma pendapatan per kapita
LOGSAN	= logaritma akses sanitasi layak
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi
e	= faktor pengganggu

- i = kabupaten ke 1, 2, 3, ... , 5
t = periode waktu 2013, 2014, ..., 2020

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Kemiskinan yang diukur dengan variabel tingkat kemiskinan (TK) sebagai variabel terikat (dependen). Empat variabel bebas yaitu desentralisasi fiskal yang diukur dengan belanja modal (BM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendapatan per kapita (PENDAPATAN) serta akses sanitasi layak (SAN), diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	TK	BM	IPM	PENDAPATAN	SAN
Mean	16.64025	3.98E+11	67.95200	23.69900	61.82975
Median	17.22000	3.85E+11	68.03000	16.83000	66.57500
Maximum	21.32000	8.44E+11	71.98000	58.37000	91.95000
Minimum	10.73000	1.12E+11	62.84000	12.18000	20.86000
Std. Dev.	2.758237	1.60E+11	2.180499	15.05725	19.46459
Observations	40	40	40	40	40

Sumber: Output Eviews 9, data diolah 2022

Pada tabel 2 jumlah observasi yaitu sebanyak 40 observasi dalam waktu penelitian selama 2013-2020. Nilai rata-rata (*mean*) variabel tingkat kemiskinan adalah 16.64025 persen sementara itu, nilai tengah (*median*) yaitu sebesar 17.22000 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi (*maximum*) yaitu sebesar 21.32000 persen diperoleh Kabupaten Kebumen tahun 2013. Nilai paling rendah (*minimum*) terdapat pada Cilacap sebesar 10.73000 persen pada tahun 2019. Simpangan baku (*standard deviation*) variabel tingkat kemiskinan sebesar 2.758237 persen. Selanjutnya, pada variabel belanja modal memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp398.000.000.000. Nilai median dari belanja modal yaitu sebesar Rp385.000.000.000. Variabel belanja modal memiliki nilai tertinggi (*maximum*) dicapai oleh Kabupaten Cilacap sebesar Rp843,986,253,460 di 2016. Nilai terendah (*minimum*) dari variabel belanja modal dicapai oleh Kabupaten Purbalingga sebesar Rp112,249,667,286 pada tahun 2014. Kemudian, simpangan baku (*standard deviation*) variabel belanja modal sebesar Rp160.000.000.000. Nilai rata-rata (*mean*) variabel IPM yaitu 67.95200 persen. Selanjutnya, nilai tengah (*median*) variabel IPM yaitu sebesar 68.03000 persen. Nilai tertinggi (*maximum*) dicapai pada Kabupaten Banyumas sebesar 71.98000 persen pada tahun 2020, sedangkan nilai terendah terdapat pada Kabupaten Banjarnegara sebesar 62.84000 persen pada 2013. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) variabel IPM sebesar 2.180499 persen. Nilai rata-rata (*mean*) pendapatan per kapita sebesar 23.69900 juta rupiah. Nilai tengah sebesar 16.83 juta rupiah. Nilai tertinggi (*maximum*) dicapai oleh Kabupaen Cilacap sebesar 58.37 juta rupiah pada tahun 2019 sedangkan nilai terendah (*minimum*) dicapai oleh Kabupaten Kebumen sebesar 12.18 juta rupiah pada tahun 2013. Variabel pendapatan per kapita memiliki simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 15.05725 juta rupiah. Terakhir, pada variabel akses sanitasi layak memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 61.82975 persen. Kemudian, nilai tengah (*median*) sebesar 66.57500 persen. Nilai tertinggi (*maximum*) variabel akses sanitasi layak tercapai oleh Kabupaten Kebumen sebesar 91.95000 pada tahun 2020 sedangkan nilai terendah (*minimum*) dicapai pada Kabupaten Banjarnegara 20.86000 persen pada tahun 2018. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) pada variabel ini adalah sebesar 19.46459 persen.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow yaitu uji yang dilakukan guna memilih model CEM atau FEM. Hasil estimasi uji Chow diketahui bahwa nilai probabilitas cross section F sebesar 0.0002 di mana lebih kecil

dari 0,05 ($0.0002 < 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman yaitu uji yang dilakukan guna memilih model REM atau FEM. Setelah dilakukan uji Chow dan diperoleh model terbaik yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman. Hasil dari estimasi uji Hausman diperoleh nilai prob. cross-section random sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 ($0.0000 < 0,05$) sehingga diketahui bahwa model terbaik yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model*.

c. Uji Breusch-Pagan Langrange Multiplier (LM)

Uji Breusch-Pagan Langrange Multiplier (LM) adalah uji yang digunakan untuk menentukan model yang terbaik di antara CEM dengan REM. Hasil dari estimasi uji Breusch-Pagan Langrange Multiplier diperoleh nilai cross section Breush Pagan sebesar 0.0000 di mana lebih kecil 0,05 ($0.0000 < 0,05$) sehingga didapatkan model terbaik adalah *Random Effect Model*

Setelah melakukan ketiga uji diatas model yang terbaik yang dipilih untuk diestimasi adalah *Fixed Effect Model* (FEM)

Uji T-Statistik

Uji t adalah uji untuk melihat besarnya tingkat signifikansi pengaruh yang ditimbulkannya variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Pendekatan ini menggunakan nilai probabilitas dan perbandingan t_{hitung} dan t_{tabel} .

Tabel 3. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	62.61378	4.368369	0.0001
LOGBM	1.162680	2.098028	0.0441
IPM	-0.671735	-2.880891	0.0071
LOGPENDAPATAN	-9.017743	-2.633669	0.0131
LOGSAN	-0.995790	-0.743048	0.4630

Sumber: Output Eviews 9, data diolah 2022

a. Uji T pada Variabel Belanja Modal

Dari hasil pengujian dari uji t dengan FEM diketahui bahwa nilai t_{tabel} dengan $n = 40$ observasi, derajat kebebasan (df) = $n - k = 40 - 5 = 35$ dengan tingkat kesalahan 5% sehingga didapatkan t_{tabel} sebesar 2.03011. Ini memberikan arti $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} ($2.098028 > 2.03011$) dan nilai probabilitas variabel belanja modal yaitu 0.0441 dengan menggunakan signifikansi 5% maka $0.0441 < 0,05$ maka dari hasil tersebut memiliki arti variabel belanja modal secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb. Belanja modal memiliki nilai koefisien sebesar 1.162680 artinya variabel belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

b. Uji T pada Variabel IPM

Analisis uji parsial dengan FEM didapatkan t_{tabel} sebesar 2.03011. Ini memberikan arti $t_{hitung} >$ t_{tabel} ($2.880891 > 2.03011$) dan nilai probabilitas variabel IPM sebesar 0.0071 menggunakan signifikansi 5% maka $0.0071 < 0,05$ maka dari hasil tersebut memiliki arti variabel Indeks Pembangunan Manusia secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb. Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.671735 artinya variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

c. Uji T pada Variabel Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan hasil pengujian dari uji t dengan FEM diketahui bahwa nilai t_{tabel} sebesar 2.03011. Ini memberikan arti $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} ($2.633669 > 2.03011$) dan probabilitas variabel pendapatan

per kapita yaitu 0.0131, menggunakan signifikansi 5% maka $0.0131 < 0,05$ maka dari hasil tersebut memiliki arti variabel pendapatan per kapita secara individu (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb. Variabel pendapatan per kapita memiliki nilai koefisien sebesar -9.017743 artinya variabel pendapatan per kapita memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

d. Uji t pada Variabel Akses Sanitasi Layak

Analisis uji parsial dengan FEM diketahui nilai t_{tabel} sebesar 2.03011. Ini memberikan arti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0.743048 > 2.03011$) dan nilai probabilitas variabel akses sanitasi layak yaitu 0.4630 dengan tingkat kesalahan 5% maka $0.4630 > 0,05$ sehingga variabel akses sanitasi layak secara individu (parsial) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb. Nilai koefisien variabel akses sanitasi layak sebesar -0.995790 artinya akses sanitasi layak memiliki hubungan yang negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Uji F-Statistik

Uji F dalam uji untuk mengetahui besarnya tingkat signifikansi pengaruh yang ditimbulkannya variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Dari hasil olah data diperoleh nilai prob. F-statistik sebesar 0.000000 sehingga $0.000000 < 0,05$. Selanjutnya, nilai F_{hitung} sebesar 40.82405 maka dengan tingkat signifikansi 5%, k = jumlah semua variabel baik independen maupun dependen, diperoleh derajat pembilang = $k - 1 = 5 - 1 = 4$ dan derajat penyebut = $n - k = 40 - 5 = 35$ sehingga F_{hitung} sebesar 2.64. Perbandingan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu $25.38705 > 2.64$. Maka dengan demikian, diperoleh suatu kesimpulan dari hasil prob. F-statistik dan perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} tabel diketahui bahwa variabel belanja modal, IPM, pendapatan per kapita, dan akses sanitasi layak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel kemiskinan.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi berguna untuk menggambarkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Berdasarkan dari uji nilai R^2 sebesar 0.913309 atau 91,33% dan nilai adjusted R-squared sebesar 0.890937 atau 89,09% artinya variabel belanja modal, IPM, pendapatan per kapita dan akses sanitasi layak dapat menjelaskan variabel kemiskinan di wilayah Barlingmascakeb sebesar 89,09%, sedangkan sisanya yaitu 10,91% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data dengan FEM sebagai model terbaik, adapun interpretasi dari hasil analisis sebagai berikut:

Hubungan Belanja Modal dengan Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil belanja modal proksi dari desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5%. Nilai koefisien variabel belanja modal sebesar 1.162680 artinya saat belanja modal meningkat sebesar 1% maka akan ikut meningkatkan kemiskinan sejumlah 1.162680% dengan mengasumsikan variabel bebas yang lain memiliki nilai tetap. Hipotesis yang telah dibuat menyatakan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan hasil dari analisis data menunjukkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan sehingga hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil ini selaras dengan temuan Isa et al. (2019) yang menerangkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya komposisi belanja modal dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat mewujudkan pemerataan manfaat yang lebih merata dengan mengutamakan masyarakat miskin. Penelitian lain yang dilakukan Joy et al. (2021) semakin besar belanja modal maka tingkat kemiskinan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pengeluaran alokasi untuk proyek-proyek modal seperti perawatan kesehatan primer, jaringan

jalan yang layak, lembaga sekolah dan universitas, serta industrialisasi mungkin mungkin dalam pelaksanaannya tidak efisien. Selaras dengan temuan tersebut, Kotambunan et al. (2016) menyatakan belum berhasilnya belanja modal dalam mengurangi kemiskinan disebabkan karena program tersebut belum dapat menyentuh dasar masalah yang terjadi pada masyarakat dengan demikian hasil yang dirasakan tidak bersifat efektif. Realisasi belanja modal pada kawasan Barlingmascakeb dalam kurun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan realisasi. Jumlah realisasi belanja modal yang semakin lama semakin menurun tentunya memiliki dampak terhadap alokasi yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan pengadaan asset tetap yang ada pada masing-masing kabupaten. Jika dilihat dari porsi belanja modal dalam APBD, persentase belanja modal yang masih jauh di bawah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan anggaran yang diberikan untuk belanja modal belum menjadi prioritas utama dalam belanja daerah. Realisasi belanja modal pada Barlingmascakeb belum mampu berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan

Pada hasil pengujian menggunakan FEM diperoleh hasil variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5%. Nilai koefisien variabel IPM yakni -0.671735 memiliki arti ketika IPM naik sebesar 1% maka tingkat kemiskinan turun sebesar 0.671735% dengan mengasumsikan variabel bebas yang lain memiliki nilai tetap. Hasil temuan ini sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan sebab variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sama seperti penelitian terdahulu Andhykha et al. (2018) di Provinsi Jawa Tengah dan Heriansyah et al. (2018). Peningkatan dalam perbaikan pada tingkat pendidikan dapat mereduksi kemiskinan karena pendidikan adalah salah satu faktor penentu kemiskinan. Selain itu, hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Isa et al. (2019) menerangkan bahwa pada tingkat pendidikan yang rendah dan kesehatan yang buruk maka akan menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa yang berakibat pada berkurangnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang baik akan menyebabkan tingginya produktivitas masyarakat yang diikuti dengan peningkatan pendapatan sehingga perekonomian masyarakat akan meningkat dengan demikian akan berkurangnya tingkat kemiskinan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari SDM-nya, dengan SDM yang berkualitas maka akan memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Meier & Baldwin dalam Arsyad (2010) mengungkapkan lingkaran kemiskinan timbul akibat adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara masyarakat yang masih terbelakang dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu alasan yang mendasari sumber daya alam belum maksimal dalam pemanfaatan dan pengembangannya adalah karena relatif rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Nilai IPM Kawasan Barlingmascakeb tergolong ke dalam kategori IPM sedang dan tinggi. Hal ini tentunya memberikan pengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya.

Hubungan Pendapatan Per Kapita dengan Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan FEM diperoleh hasil variabel pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan pada taraf signifikansi 5%. Variabel pendapatan per kapita memiliki nilai koefisien yakni sebesar -9.017743 artinya ketika pendapatan per kapita naik maka sebesar 1% maka tingkat kemiskinan turun sebanyak 9.017743% dengan mengasumsikan variabel bebas yang lain memiliki nilai tetap. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan temuan Tri Septiani et al. (2019) dan Fadlillah (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Erfani (2019) di mana pendapatan per kapita dapat menurunkan tingkat kemiskinan disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan per kapita setiap tahunnya, dengan pendapatan per kapita yang tinggi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain itu, adanya daya beli dan konsumsi yang mengalami peningkatan menjadi penyebab tingkat kemiskinan mengalami penurunan karena dikatakan bahwa daya beli dan pengeluaran konsumsi yang tergolong tinggi

mencerminkan tingkat kemakmuran yang semakin meningkat. Hasil ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan Sukirno (2010) yang mengemukakan bahwa pendapatan per kapita merupakan ukuran yang digunakan dalam menentukan tingkat kemakmuran setiap daerah. Semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita Barlingmascakeb mengalami kenaikan yang memberikan tanda bahwa output yang dihasilkan yang meningkat akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pendapatan. Pada kasus kawasan Barlingmascakeb pendapatan per kapita mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini menggambarkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh kelima kabupaten ini relatif baik.

Hubungan Akses Sanitasi Layak dengan Kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian dengan FEM diperoleh hasil variabel akses sanitasi layak tidak signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di taraf signifikansi 5% sebab memiliki nilai probabilitas diatas 0,05. Nilai koefisien variabel akses sanitasi layak sebesar -0.995790 artinya ketika akses sanitasi layak naik maka sebesar 1% maka tingkat kemiskinan turun sebesar 0.995790% namun tidak berpengaruh signifikan. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dinyatakan karena variabel akses sanitasi layak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Mayasari (2020) dan (Sari et al., 2021) yang menyatakan bahwa akses sanitasi layak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun, hasil penelitian ini selaras dengan temuan terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2021) menunjukkan sanitasi layak tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat telah menggunakan fasilitas toilet pribadi dengan kondisi infrastruktur yang baik. Akses sanitasi layak yang meningkat setiap tahunnya menggambarkan sanitasi bukan lagi kebutuhan yang sulit untuk dimiliki masyarakat. Akses sanitasi memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan di mana semakin baik akses terhadap sanitasi maka akan semakin kecil mengalami risiko kemiskinan namun memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan sebelumnya antara lain:

- a. Variabel belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Hal ini ditandai dengan meningkatnya belanja modal 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 1.162680%.
- b. Variabel IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Hal ini ditandai dengan meningkatnya IPM 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.671735%.
- c. Variabel pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Hal ini ditandai dengan meningkatnya sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar sebesar 9.017743%.

Variabel akses sanitasi layak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kawasan Barlingmascakeb tahun 2013-2020. Hal ini ditandai dengan meningkatnya sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar sebesar 0.995790%, namun tidak berpengaruh signifikan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, diperoleh beberapa rekomendasi kebijakan yaitu:

- a. Diperlukan program dari alokasi belanja modal yang dapat menyentuh dasar masalah masyarakat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan hasil dari belanja modal. Belanja modal yang dipakai untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur

seperti sekolah, gedung, jalan raya dan irigasi harus dapat berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya.

- b. Pemerintah perlu melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan kualitas SDM penduduknya. Dari sektor pendidikan, pemerintah dapat memperbanyak fasilitas pendidikan dan mendirikan perpustakaan umum sehingga akan tercipta pemerataan pendidikan. Kemudian, dari sektor kesehatan pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan seperti, optimalisasi terhadap pelayanan kesehatan, memperbanyak puskesmas dan rumah sakit untuk masyarakat kurang mampu sehingga dapat diakses dengan mudah.
- c. Peningkatan pendapatan per kapita memiliki dampak terhadap penrnan kemiskinan. Potensi-potensi daerah yang dimiliki Barlingmascakeb perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan lapangan kerja baru, seperti potensi wisata, pertanian, industri pengolahan dan perikanan akan memberikan peningkatan kontribusi pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah setempat. Pemerintah diharapkan dapat membekali masyarakat dengan *skill* baru yang diperlukan saat ini dalam dunia kerja melalui pengadaan program pelatihan kerja, sertifikasi, workshop dan seminar untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- d. Pemerintah diharapkan meningkatkan anggaran perbaikan untuk akses sanitasi layak karena sanitasi layak adalah kebutuhan penting untuk kehidupan setiap harinya apabila ketidak terjangkauan terhadap sanitasi layak terjadi maka akan menimbulkan masalah baru seperti timbulnya penyakit. Perlunya memberikan sosialisasi tentang pentingnya sanitasi layak dalam rumah tangga yang kurang dianggap sebagai kebutuhan prioritas terutama untuk masyarakat pedesaan

5. REFERENSI

- Adhi, E. T. (2009). Pelayanan Sanitasi Buruk: Akar Dari Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial* Vol., 14(2), 76–86. <https://media.neliti.com/media/publications/547-IDpelayanan-sanitasi-buruk-akar-dari-kemiskinan.pdf>
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (edisi ke 5). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Badan Pusat Statistik.
- Bank, W. (2013). *Poor Sanitation Impedes Indonesia's Growth Potential*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/10/28/Poor-SanitationImpedes-Indonesia-8217-s-Growth-Potential>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (n.d.). Retrieved March 18, 2022, from <https://jateng.bps.go.id/indicator/12/766/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupatenkota-di-jawa-tengah.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Setelah TA 2006. (n.d.). Retrieved January 27, 2022, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Erfani, M. H. (2019). Analysis Of The Effect Of Economic Growth, Per Capita Income And Working For Against Absolute Poverty Level In Hulu Sungai Utara District. *Jurnal Ecoplan*, 2(1), 1–9.
- Fadlillah, N. (2013). Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, ipm dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di jawa tengah tahun 20092013.
- Ghozali, I., & Radmono, D. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Haughton, J., & Khandker, S. R. (2009). Chapter 01. What is Poverty? Why measure it? Handbook on Poverty and Inequality, 16, 7–11. <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/handle/123456789/9080>
- Heriansyah, R. D., Nuraini, I., & Kusuma, H. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Industri dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 453–463.
- Isa, D. P., Arham, M. A., & Dai, S. I. (2019). Effects of Capital Expenditures, Development Index and Unemployment on Poverty in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.1998>
- Joy, J. N., Okafor, M. C., & Ohiorenuan, I. H. (2021). Impact of Public Capital Expenditure on Poverty Rate in Nigeria. *International Journal Papier Public Review*, 2(4), 46–55. <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i4.115>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (T. U. Press (Ed.); 2018th ed.). UB Press.
- Kotambunan, L., Palar, S. W., & Tumilaar, R. L. . (2016). ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DIPROVINSI SULAWESI UTARA (Dalam Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 925–933. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12078>
- Manase, G., Nkuna, Z., & Ngorima, E. (2009). Using water and sanitation as an entry point to fight poverty and respond to HIV/AIDS: The case of Isulabasha Small Medium Enterprise. *Physics and Chemistry of the Earth*, 34(13–16), 866–873. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2009.07.007>
- Mayasari, T. R. (2020). Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Variabel Kesehatan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Siger Matematika*, 1(1), 24–30. <https://doi.org/10.23960/jsm.v1i1.2471>
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Ekonometrika: Pendekatan Populer dan Praktis Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nugraha, A. T., Prayitno, G., Nandhiko, L., & Nasution, A. R. (2021). Socioeconomic conditions on poverty levels a case study: Central Java Province and Yogyakarta in 2016. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 60(1), 1–13. <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2021.233206>
- Sari, F. M., Nasution, H. F., & Sihombing, P. R. (2021). Pemodelan Data Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Menggunakan Regresi Spasial. *Jurnal Matematika Dan Aplikasinya (IJMA)*, 2(1), 51–61.
- Shahzad, S., & Yasmin, B. (2016). Does fiscal decentralisation matter for poverty and income inequality in Pakistan? *Pakistan Development Review*, 55(4), 781–802. <https://doi.org/10.30541/v55i4i-ijpp.781-802>
- Sudewi, N. N. A., & Wiranthi, I. G. A. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 135–141.
- Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Kencana.
- Suryawati, C. (2005). MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL. *JMPK*, 08(03), 121–129.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514–526. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6288>

- Syamsul. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 140–147. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Penerbit Erlangga.
- Tri Septiani, W., Zamzami, Z., & Mustika, C. (2019). Analisis pengaruh pendapatan perkapita dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera. *EJurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 135–148. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v8i3.7351>.